

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa resistensi RUU Pilkada 2024 di akun Instagram @Wordfangs berdampak signifikan. Dengan menggunakan model *framing* Robert M. Entman (1993), dapat diidentifikasi bahwa RUU Pilkada tahun 2024 diindikasikan sebagai krisis demokrasi karena dominasi elite yang menginginkan kritik terhadapnya direpresi; bentuk kritik melalui simbol, meme, dan narasi tentang hilangnya legitimasi moral kekuasaan menjadi strategi @Wordfangs dalam melawan dominasi elite; pada akhirnya, @Wordfangs menggunakan resistensi kolektif yang kreatif dan adaptif.

Praktik resistensi di Instagram @Wordfangs menunjukkan bahwa gerakan sosial digital tidak dapat dipahami hanya sebagai ledakan momen sesaat, melainkan sebagai bentuk mobilisasi politik baru yang berakar pada jejaring, personalisasi, dan distribusi simbolik. Eksistensi akun @Wordfangs menegaskan bahwa dominasi politik ruang digital memperlihatkan selebriti dapat berfungsi sebagai agen politik alternatif yang efektif dengan memanfaatkan simbol visual, narasi emosional, dan interaksi audiens. Pandangan Van Zoonen, sebagaimana tercatat dalam kajian Akhni dan Andini (2025), yang menyoroti penggunaan budaya populer dalam komunikasi politik yang tidak dapat diabaikan, termasuk penggunaan tema politik dalam fiksi populer, pemanfaatan budaya populer itu sendiri sebagai medium perlawanan, serta penggunaan budaya populer oleh politisi sebagai panggung untuk meningkatkan popularitas mereka. Keterkaitan pandangan ini semakin jelas oleh konsep *memetic resistance* dari Gerbaudo, yang menegaskan bagaimana meme dan simbol digital dapat berfungsi sebagai taktik perlawanan yang menjaga isu tetap hidup di tengah represi (Romancini, 2020).

Dapat ditegaskan bahwa konten akun @Wordfangs nyata membentuk perlawanan terhadap RUU Pilkada 2024 karena memanfaatkan strategi simbolik, interaksi publik, dan logika *Connective Action* yang memungkinkan pesan

perlawanan menyebar tanpa struktur organisasi formal. Karena dianggap autentik dan resonan dengan budaya populer, kehadiran @Wordfangs sebagai aktor CP2 meningkatkan daya tarik resistensi. Sejalan dengan temuan Dumitrica & Hockin-Boyers (2023) bahwa visualisasi politik di Instagram mampu memobilisasi solidaritas kolektif, serta Wheeler (2013) yang menekankan legitimasi politik berbasis otoritas kultural selebriti.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya studi tentang *Framing* model Entman (1993), *Celebrity Politics* oleh John Street (2004), dan logika *Connective Action* oleh Bennett dan Segerberg (2012). Autentisitas kritik oleh @Wordfangs mengonfirmasi teori John Street dengan menggunakan *affective capacity* dan modal kulturalnya untuk membangun hubungan emosional dengan publik, sehingga representatif @Wordfangs hadir dalam kelompok kontra RUU Pilkada. Selain itu, mobilisasi simbol digital Peringatan Darurat juga selaras dengan konsep *Connective Action*, di mana aksi politik tidak lagi bergantung pada struktur formal, tetapi tumbuh dari jejaring media sosial yang fleksibel dengan melibatkan partisipasi publik yang menginterpretasikan setiap unggahan resistensi @Wordfangs dalam kolom komentar.

Temuan kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dua komponen utama adalah yang paling penting. Pertama, penelitian ini menemukan pola *framing* baru di mana publik tidak lagi diposisikan sebagai penerima pesan pasif; mereka sekarang berpartisipasi dalam membentuk makna politik melalui interaksi digital. Pola ini menunjukkan bahwa resistensi di media sosial bergerak seperti logika *Connective Action*, dengan menjadikan partisipasi publik sebagai proses kerja sama kolektif untuk membangun makna dan solidaritas politik. Kedua, penelitian ini memasukkan ide *localized celebrity activism*, yang menggambarkan bagaimana aktivisme politik selebriti selalu menyesuaikan konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Hal ini bisa menjadi model analisis alternatif yang menjelaskan bagaimana aktivisme digital selebriti di Indonesia mampu menjadi *role model politics*, yakni bentuk ekspresi yang menginspirasi publik sekaligus merespons dinamika politik secara adaptif dan resonan dengan pengalaman masyarakat lokal.

Akan tetapi, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Pertama, analisis tidak melihat dinamika di platform lain seperti Instagram, Facebook, atau X, yang mungkin memiliki konfigurasi politik yang berbeda. Sebaliknya, analisis hanya melihat Instagram sebagai ruang *framing*. Kedua, penelitian tidak melihat tren dalam jangka panjang karena hanya membahas topik kontroversial RUU Pilkada tahun 2024. Ketiga, penelitian hanya menekankan satu figur publik, yakni @Wordfangs, yang memungkinkan analisis lebih mendalam, tetapi tidak luas. Studi selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif lintas platform bagaimana selebriti membangun *framing* terhadap dinamika politik yang terjadi. Serta melalui studi *longitudinal* menilai transformasi strategi komunikasi figur seperti @Wordfangs dan pergeseran persepsi publik dari waktu ke waktu.

